

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Teknis pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyusunan, pelaksanaan, dan penghitungan APBD, tercantum pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Sebagai ukuran kapasitas pemerintah daerah dalam menghimpun dana untuk mendukung belanja daerah untuk pelayanan sosial masyarakat dan pembangunan, APBD mencerminkan pengelolaan keuangan daerah. Dalam menilai proses pembangunan daerah, laporan APBD dari setiap daerah dapat menjadi salah satu tolak ukur. Sebagai ukuran akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Masyarakat dapat menggunakan laporan ini untuk mengevaluasi seberapa baik pemerintah mengelola keuangan daerah, apakah pendapatan yang terkumpul telah ditangani secara efisien, dan apakah distribusinya sesuai dengan keperluan masyarakat (Permendagri, 2020).

Pemerintah daerah diwajibkan untuk memakai APBD, terutama guna belanja modal, untuk mencoba meningkatkan standar pelayanan publik. Pengalokasian belanja modal ini dapat difokuskan pada sektor-

sektor strategis seperti kesehatan, Pendidikan, dan transportasi agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah. Selain untuk pembiayaan belanja, PAD juga memiliki peran penting dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui kinerja keuangan pemerintah daerah yang berasal dari berbagai sektor ekonomi. Kinerja ini mencerminkan sejauh mana peningkatan atau penurunan telah terjadi dalam pengembangan ekonomi di daerah tersebut.

Pemerintahan mestinya tidak lepas dari laporan finansial yang disebut akuntansi keuangan pemerintahan. Pengelolaan keuangan memuat peranan guna menentukan nasib pemerintah daerah sebab dengan mengelola keuangan yang baik maka pemerintahan akan menjadi kuat dan mampu berkembang, selain itu juga aset daerah akan terjaga. Peran pemerintah daerah terkait mengelola keuangan sangat menentukan perkembangan ekonomi daerah sehingga evaluasi kepada PAD serta belanja modal sangat berdampak kepada kinerjanya keuangan pemerintah daerah pada setiap periode, maka dari itu kinerjanya pada tahun berikutnya harus ditingkatkan lagi. Kinerja pemerintah digambarkan melalui laporan keuangannya. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan satu di antara cara guna memantau serta menilai kinerja keuangan daerah secara keseluruhan dan juga kinerja unit-unit kinerjanya.

Kemampuan suatu daerah untuk mengembangkan potensinya dan berkontribusi pada pertumbuhan pendapatannya setiap tahun merupakan ukuran kinerja keuangan pemerintah. Karena mengukur bagaimana pemerintah mengelola keuangannya dan menentukan pendapatan dan pengeluaran untuk memenuhi tujuan dan sarana yang ingin dicapai, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting. Hal tersebut mencerminkan apakah kinerja pemerintah efektif dan efisien dalam mengelola keuangannya untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan serta memperbaiki perekonomian pemerintah(Partai, 2018).

Kinerja keuangan provinsi jawa tengah memberikan tren positif dalam berbagai aspek, termasuk dalam pendapatan daerah, pengendalian inflasi, dan pembangunan manusia. Namun ada berbagai aspek kinerja pemerintahan di Indonesia pada Pembangunan Infrastruktur khususnya perbaikan jalan masih banyak yang mangkrak salah satunya di Provinsi Jawa Tengah yaitu pada proyek perbaikan jalan di Jalan Kyai Mojo dan Jalan Juanda, Solo menghabiskan dana senilai Rp. 7,6 Milyar(Jateng, 2022). Hal tersebut dapat berdampak negatif bagi perekonomian pemerintah, termasuk kerugian finansial, hambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan kepercayaan publik, dan dampak sosial serta lingkungan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah dan mendorong pertumbuhan melalui PAD, pemerintah daerah harus mampu

mengevaluasi sumber-sumber keuangan mereka sebagai bagian dari fungsi kewenangan mereka. Satu di antara sumber pendanaan utama untuk pengeluaran pemerintah daerah adalah PAD, yang sah seperti pajak, retribusi, pengelolaan aset, dan sumber lainnya. Sejauh mana kemampuan keuangan daerah untuk mendukung kebutuhannya merupakan indikator yang baik bagi keberhasilannya. Mampu karena tidak bergantung pada transfer uang dari pemerintah federal Karena pendapatan daerah memberi kekuatan kepada pemerintah dan menunjukkan kesejahteraan warganya, pendapatan daerah merupakan motivator yang sangat penting. Dibawah ini merupakan tabel PAD

Tabel 1. 1 Kenaikan/penurunan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Surakarta	-10%	14%	15%	-3%	-11%
kota Tegal	-7%	16%	10%	-9%	23%
kota Magelang	6%	10%	18%	-23%	20%
Kab. Pekalongan	0%	1%	-12%	1%	28%
Kab. Pemalang	-6%	11%	-12%	-21%	44%
kab .purbalingga	2%	20%	-15%	-4%	-16%
Kab. Jepara	9%	-3%	16%	-10%	17%
kab. Karanganyar	-1%	11%	20%	-22%	14%

Sumber : APBD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan tabel tersebut PAD pada tiap Kabupaten/Kota mengalami fluktuasi yakni perubahan naik turun. Dengan rata-rata penurunan pada Kenaikan terjadi pada tahun 2021 kenaikan tertinggi pada Kabupaten Purbalingga sebesar 20% dan pada Kabupaten Jepara

mengalami penurunan -3%, tahun 2023 pada setiap Kabupaten /Kota rata - rata mengalami penurunan tetapi Kabupaten Pekalongan mengalami kenaikan 1% dan penurunan tertinggi pada Kota Magelang -23%.

Karena belanja daerah terkait erat dengan layanan publik yang diberikan pemerintah daerah, maka belanja daerah memiliki dampak substansial terhadap kinerja keuangan mereka selain PAD (PAD). Belanja daerah berpengaruh sebagai instrumen kebijakan ekonomi, yang dampaknya dapat dirasakan dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah. Belanja modal adalah elemen penting dari belanja daerah. Pengeluaran pemerintah daerah pada aset tetap fisik dan aset tetap lainnya yang memberikan manfaat jangka panjang dalam manajemen pemerintah dikenal sebagai belanja modal. Pembangunan infrastruktur, pembelian peralatan, dan pembelian aset tetap lainnya termasuk dalam kategori belanja modal. Makin besar investasi dalam belanja modal, maka makin besar pula potensi peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebaiknya, jika penyerapan belanja modal rendah, hal ini dapat menghambat kinerja pelayanan yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kinerja dan kualitas pelayanan pemerintah daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah tabel belanja modal Kabupaten serta Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024.

Tabel 1. Kenaikan/Penurunan belanja modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Surakarta	-54%	36%	12%	-2%	-43%
kota Tegal	-12%	-1%	-1%	-38%	-8%
kota Magelang	-57%	60%	-17%	-3%	11%
Kab. Pekalongan	-30%	-14%	26%	-3%	-34%
Kab. Pemalang	-1%	-47%	-16%	42%	-36%
kab .purbalingga	-50%	51%	-24%	-11%	-27%
Kab. Jepara	-18%	-13%	-15%	1%	-6%
kab. Karanganyar	-51%	37%	31%	-1%	34%

Sumber : APBD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan tabel diatas, belanja modal pada delapan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa beberapa kabupaten/kota mengalami fluktuasi belanja modal yang signifikan dari tahun ke tahun. Beberapa kabupaten/kota juga mengalami penurunan belanja modal yang besar pada tahun tertentu.

Kinerja ialah hasil atau pencapaian daripada strategi yang sudah ditetapkan. Kinerja bisa dikatakan berhasil jika dilaksanakan sesuai dengan rencana, dengan mempertimbangkan anggaran, kualitas, dan kuantitas secara terukur. Meningkatkan kualitas kinerja dan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah merupakan tujuan utama pengukuran kinerja. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut agar bisa membangun sistem kinerja yang optimal, transparan, dan akuntabilitas. Dalam

mengevaluasi akuntabilitas pemerintah daerah, terutama di sektor pengelolaan keuangan, pengukuran kinerja merupakan komponen penting. Kinerja keuangan, yang mempresentasikan pencapaian di bidang pendapatan serta belanja daerah, ialah satu di antara ukuran kinerja yang penting. Oleh sebab itu, PAD serta ekspansi belanja daerah merupakan indikator kinerja keuangan. (Maulana Andrifa, SE., 2018). Agar pemerintah daerah dapat mengembangkan kinerja yang kuat, metrik ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah.

Kinerja keuangan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 1. Kenaikan/Penurunan Sisa Lebih Anggaran Pendapatan dan Belanja 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Surakarta	177%	8%	-19%	-49%	-26%
kota Tegal	36%	-30%	-72%	-59%	-3%
kota Magelang	135%	19%	-35%	-92%	335%
Kab. Pekalongan	2%	-2%	-34%	-85%	362%
Kab. Pemalang	-64%	59%	-21%	3%	-65%
Kab .purbalingga	39%	24%	-50%	-6%	-48%
Kab. Jepara	24%	29%	-47%	-27%	68%
kab. Karanganyar	-10%	-1%	5%	-30%	13%

Sumber: APBD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

Pada tabel diatas kenaikan/penurunan SILPA dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan SILPA yang signifikan pada tahun 2024 sebesar 362%, kemungkinan disebabkan oleh peningkatan pendapatan daerah. Pada Kota Tegal mengalami penurunan SILPA yang besar pada tahun 2022 sebesar -72%, kemungkinan disebabkan oleh peningkatan belanja daerah. Dan Kabupaten Karanganyar

relatif stabil dalam hal SILPA, dengan perubahan yang tak begitu besar dari tahun ke tahun."

Menurut temuan studi terdahulu yang diteliti oleh (Fernandes & Putri, 2022), Analisis regresi data panel melalui aplikasi eviews 9 merupakan pendekatan analisis yang diimplementasikan pada studi ini, yang menggunakan data sekunder dari laporan statistik tahunan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Temuan studi mengindikasi bahwa meskipun belanja modal tak berdampak pada kinerja keuangan daerah, PAD memiliki dampak yang menguntungkan. Pada penelitian (Putu et al., 2018) menjabarkan bahwa Menurut penelitian tersebut, kinerja pemerintah daerah secara signifikan dipengaruhi secara negatif oleh belanja modal, sementara kinerja keuangan daerah secara signifikan dipengaruhi secara positif oleh PAD.

Menurut (Pratama et al., 2024) bahwa belanja modal daerah serta PAD tak berdampak oleh kinerja keuangan daerah.

Berlandaskan pemaparan latar belakang data tersebut, peneliti berminat guna menjalankan riset lanjutan terkait variabel-variabel yang telah disebutkan. Hal ini didorong oleh adanya hasil penelitian yang menunjukkan temuan yang saling bertolak belakang, di mana sebagian penelitian menunjukkan adanya pengaruh, sementara yang lain tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Oleh sebab itu, peneliti hendak

menguji kembali variabel -variabel tersebut guna memperkuat atau membandingkan hasil – hasil penelitian sebelumnya.

Berdasarkan data dan permasalahan yang telah didefinisikan, peneliti merasa penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terkait kinerja keuangan pemerintah daerah dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah pada delapan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah”**

1.2. Perumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagaimana berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024?
2. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan permasalahan tersebut, maka tujuan daripada studi ini ialah guna :

1. Menguji dan menganalisis dampak PAD kepada kinerja keuangan pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024.
2. Menguji dan menganalisis dampak belanja modal kepada kinerja keuangan pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024.
3. Menguji serta menganalisis dampak PAD serta belanja modal secara simultan kepada kinerja keuangan pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Temuan dari studi ini diharap bisa memberi manfaat bagi berbagai pihak, yakni:

1. Bagi Penulis

Bisa mengoptimalkan pemahaman dan pengetahuan mengenai perhitungan dan evaluasi laporan keuangan anggaran pendapatan serta belanja daerah, sehingga penulis bisa mengetahui lebih mendalam terkait kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. Bagi Akademik

Hasil dari studi ini diharap bisa menambah literasi bagi akademik untuk riset selanjutnya tentang kinerja keuangan pemerintah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan dari studi ini semoga bisa digunakan sebagai acuan dari riset berikutnya. kemudian dapat dikembangkan lagi sesuai dengan perkembangan zaman.

4. Bagi Pemerintah

Kegunaan studi ini bagi pemerintah yaitu sebagai rujukan serta dapat memberikan gambaran tentang bagaimana mengevaluasi kinerja keuangan daerah dalam hal anggaran pendapatan serta belanja daerah

